

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara**

OLEH:

NAMA	: KURNIA INDAH SARI
NPM	: 2031103101
JURUSAN	: ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI	: ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA



**SKRIPSI
PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA
2021**

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

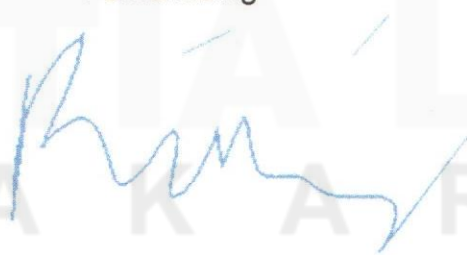
LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : KURNIA INDAH SARI
NPM : 2031103101
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada 11 Agustus 2021

Pembimbing



Pembimbing

Dr. Ridwan Rajab, M.Si

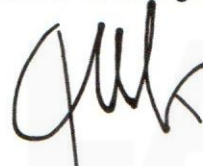
Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Program Sarjana Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2021

Ketua merangkap anggota,



Dr. Bambang Giyanto, SH., M.Pd.

Sekretaris merangkap anggota,



Nila Kurniawati, S.AP., M.AP

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurnia Indah Sari
NPM : 2031103101
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 09 Agustus 2021

Penulis,



Kurnia Indah Sari
2031103101

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan semua pihak, baik yang langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terutama kepada Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang penuh kerendahan hati, memberikan masukan positif, dan mengarahkan saya untuk selalu fokus untuk menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar (*coaching team*) pada Program Sarjana Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta
3. Bapak Dr. Edy Sutrisno, SE., M.Si. Selaku Ketua Prodi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara
4. Ibu Triksaningtyas Gayatri, S.Ip., M.Si. , Bapak Al Zuhurf, S.Sos., M.Si. , Bapak Alamsyah, S.Sos., MAP., Bapak Pujiatmo Subarkah, S.E.Ak., M.Sc. yang telah bersedia diwawancarai dalam rangka pengumpulan informasi skripsi ini
5. Ibu Mariana Yunita Malau, S.S. yang telah membantu dalam mengarahkan penelitian di Lembaga Administrasi Negara
6. Bapak Dr. Makhdom Priyatno, M.A. yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini
7. Bapak Sigit, Bapak Saeful dan Bapak Triadi yang telah membantu mengarahkan pencarian referensi buku dan skripsi di perpustakaan Politeknik STIA LAN Jakarta
8. Ibunda, serta (alm) Ayahanda tercinta, atas segala doa, kasih sayang, dorongan serta perhatian yang diberikan sehingga penulis bisa menjadi seperti ini
9. Kakak tercinta Taufan Hidayat, S.Kom, Dewi Lestari, S.H., Ibnu Chandra Pamungkas, S.Kom. Atas segala doa, motivasi, dan inspirasi yang telah diberikan
10. Benedictus mahardhika Aji Pratama dan Raihan Dafarel yang telah memberikan motivasi dan menyediakan ruang dan alat dalam mengerjakan skripsi ini

11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan serta saran dan dorongan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat.

Jakarta, 9 Agustus 2021

Penulis



Kurnia Indah Sari

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

KURNIA INDAH SARI, 2031103101

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA RI

Skripsi, xcv hlm. 95 Halaman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara dan telaah dokumen. Penulis menggunakan teori George C. Edward dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor antara lain : Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi, dan Faktor Struktur Birokrasi.

Hasil Penelitian yang diperoleh: *Pertama*, faktor komunikasi terjalin baik, karena komunikasi antar unit/satker dilakukan secara formal maupun informal sudah bekerjasama dengan baik, hingga berhasil pemberian informasi publik mendapatkan predikat Badan Publik yang Informatif.

Kedua, Sumber daya kualitas SDM pelaksana dianggap sudah cukup hanya perlu ditambahkan dibagian pemenuhan informasi publik. Sarana dan prasarana juga tersedia dan bagian arsipnya tertata dengan baik melalui pelaporan satker/unit. Namun dari segi kewenangan tidak semua informasi dipahami oleh PPID, sehingga masih perlu pemberian informasi langsung ke unit terkait.

Ketiga, dukungan unsur pimpinan tidak didukung dengan dukungan tataran dibawahnya, sehingga tidak terjadi kesepahaman dalam implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Keempat, struktur birokrasi sudah tersedia pembagian tugasnya pun sudah jelas. Struktur birokrasi disini merupakan wujud konsistensi intansi/organisasi dalam menjalankan kebijakan dengan tertib, diadakan juga koordinasi rapat pejabat pengelolaan dan pelayanan informasi yang melibatkan PPID Pusat dan PPID Daerah

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Perlunya sosialisasi secara menyeluruh dan implementor harus konsisten dalam komunikasikan informasi, Peningkatan kualitas SDM terutama bagi pelaksana kebijakan yang memerlukan kompetensi khusus dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Perlu ditingkatkan lagi kesadaran akan pentingnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk mempertahankan predikat Lembaga Negara yang informatif, dan perlunya konsistensi dalam menjalankan standar operasional prosedur pelayanan dan pengelolaan informasi.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi*

ABSTRACT

KURNIA INDAH SARI, 2031103101

IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION
SERVICE AND MANAGEMENT POLICIES AT NATIONAL
INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

Skripsi, xcv pages. 95 Pages

This study aims to determine how the Implementation of Public Information Management and Service Policies in the State Administration of the Republic of Indonesia.

This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are interviews and document review. The author uses the theory of George C. Edward where policy implementation is influenced by 4 (four) factors, including: Communication Factors, Resource Factors, Disposition Factors, and Bureaucratic Structure Factors.

Research results obtained: First, the communication factor is well established, because communication between units/satker is carried out formally and informally and has worked well together, so that the provision of public information has succeeded in getting the title of Informative Public Agency.

Second, the quality of implementing human resources is considered sufficient, it only needs to be added to the fulfillment of public information. Facilities and infrastructure are also available and the archive section is well organized through the reporting of the unit. However, in terms of authority, not all information is understood by PPID, so it is still necessary to provide information directly to the relevant unit.

Third, the support of the leadership elements is not supported by the support of the lower levels, so that there is no understanding in the implementation of public information management and service policies.

Fourth, the bureaucratic structure is already available and the division of tasks is clear. The bureaucratic structure here is a form of consistency of agencies/organizations in carrying out policies in an orderly manner, coordination of management and information service official meetings are also held involving the Central PPID and Regional PPIDs.

From the results of the research that has been carried out, suggestions that can be given are as follows: The need for thorough socialization and implementors must be consistent in communicating information, Improving the quality of human resources, especially for policy implementers who require special competencies in the management and service of public information, Need to increase awareness of the importance of public information management and services to maintain the title of informative State Institution, and the need for consistency in carrying out standard operating procedures for information services and management policy.

Keywords: Policy Implementation, Management and Information Services

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Fokus Permasalahan.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KERANGKA TEORI.....	6
A. Tinjauan Teori.....	6
B. Konsep Kunci	37
C. Model Berpikir.....	38
D. Pertanyaan Penelitian.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
A. Metode Penelitian.....	41
B. Teknik Pengumpulan Data	43

	C. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data	48
	D. Validasi Data	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	51
	A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	51
	B. Hasil Analisis Penelitian	55
	1. Komunikasi.....	56
	2. Sumber Daya	66
	3. Disposisi / Sikap	80
	4. Struktur Birokrasi.....	83
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	90
	A. Simpulan	90
	B. Saran.....	94
	DAFTAR PUSTAKA	96
	LAMPIRAN.....	

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Informan	46
Tabel 4.1	SDM Pengelola dan pelayanan Informasi.....	68
Tabel 4.2	Prasarana Ruang Humas LAN RI.....	79
Tabel 4.3	Sarana Ruang Humas LAN RI.....	79



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tahapan Kebijakan	10
Gambar 2.2	Model Proses Kebijakan Publik Thomas R. Dye.....	14
Gambar 2.3	Model Kebijakan Publik menurut Edward III	23
Gambar 2.4	Model Implementasi Kebijakan Publik	39
Gambar 4.1	Piagam dan Plakat Penghargaan Informatif tahun 2020 dari KIP	56
Gambar 4.2	Ruang Pelayanan Informasi Lembaga Administrasi Negara.....	77
Gambar 4.3	Berita Penghargaan Predikat Informatif LAN	83

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Matriks Pengembangan Instrumen
- Lampiran 2: Struktur Organisasi Lembaga Administrasi Negara
- Lampiran 3: Struktur Penyelenggara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
- Lampiran 4: Pedoman Wawancara
- Lampiran 5: Surat Pengantar Penelitian Politeknik STIA LAN Jakarta
- Lampiran 6: Surat Persetujuan Permohonan Penelitian
- Lampiran 7: Surat Keterangan Selesai Penelitian

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, dimana hal tersebut merupakan hak komunitas atau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dijamin dan diimplementasikan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik masyarakat dapat memantau tingkat informasi publik. Sehingga, setiap organisasi publik harus secara resmi mengatur komunikasi dan informasi yang transparan dan akuntabel sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut asas keterbukaan di negara demokrasi, negara harus menjamin hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang didasari oleh prinsip perlindungan atas hak-hak publik untuk memperoleh seluruh informasi yang dikelola oleh organisasi publik terkecuali informasi yang dikecualikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ada pengecualian untuk melindungi publik dari konsekuensi negatif jika

informasi tersebut dibuka serta informasi-informasi yang membahayakan stabilitas keamanan negara.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan bentuk dorongan partisipasi aktif keterlibatan masyarakat dan pemerintah guna mewujudkan komitmen hak dasar publik atas kebutuhan atas kebutuhan layanan informasi. Secara normatif, Undang-Undang KIP dapat dikatakan sebagai produk regulasi yang mengedepankan perwujudan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan jaminan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Hal ini mendorong pemerintahan yang terbuka dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan ciri transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Kebebasan informasi disatu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara disisi yang lain kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang strategis. Keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang transparan dan akuntabel.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi, hak dan kewajiban diatur, tanggung jawab dan kewajiban publik dan penyelenggara negara harus seimbang. Tujuannya agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyelenggara pemerintahan negara. Kebebasan untuk menggunakan hak ini harus disertai dengan kewajiban untuk mengungkapkan fakta dan kejadian aktual dengan mematuhi dan menghormati standar etika yang diterima serta hukum dan peraturan saat ini.

Lalu, sebagai organisasi publik, Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN menerbitkan Peraturan Kepala LAN Nomor 19 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Kepala LAN (Perka) Nomor 22 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik untuk mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berbagai pihak turut berpartisipasi dalam penyusunan Perka LAN, dengan tujuan agar seluruh satuan kerja (satker) dapat turut serta memberikan informasi yang dikelola oleh satker. Dengan cara ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengumpulkan semua informasi dan mengkategorikannya menurut jenis informasinya melalui kelompok pertimbangan pengelolaan informasi. Informasi yang sudah diklasifikasikan dapat

disebarluaskan atau dipublikasikan kepada pemohon informasi melalui akses website resmi LAN atau berkunjung langsung ke kantor LAN.

Namun, terdapat juga kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik. Menurut Laporan Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi LAN tahun 2019 ada beberapa kendala yang ditemui, di antaranya sebagai berikut:

1. Belum adanya basis data/database yang terstruktur dan terintegrasi pada unit-unit pemilik informasi dengan PPID
2. Belum meratanya pemahaman pegawai di unit-unit pemilik informasi mengenai keterbukaan informasi publik.

Kendala-kendala tersebut menyebabkan implementasi Perka LAN tersebut terindikasi kurang efektif. Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang implementasi peraturan Perka LAN untuk mengetahui bagaimana efektivitas peraturan tersebut diterapkan.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, maka fokus permasalahan dirumuskan sebagai berikut: *“Bagaimana Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia”*

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengelolaan dan Keterbukaan Informasi Publik Pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat terhadap Dunia Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang manajemen kebijakan publik, khususnya terkait dengan pengimplementasian kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dengan mengetahui implementasi keterbukaan informasi publik pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

2. Manfaat terhadap Dunia Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbang saran bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan yang terkait implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.